BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah sumber penerimaan dan pendapatan yang diperoleh negara yang bersifat memaksa yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang termasuk sebagai wajib pajak menurut peraturan perundang – undangan yang memiliki tujuan dalam membiayai pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan agar rakyat sejahtera (Purnamawati et al. 2018). Berdasarkan peraturan Undang – Undang mengenai Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib diberikan kepada negara oleh wajib pajak maupun itu orang pribadi atau badan yang terutang dan memiliki sifat yang memaksa berdasarkan peraturan Perundang – Undangan, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung yang nantinya akan dipakai sebagai keperluan negara dalam mencapai kemakmuran rakyat (Pratama et al. 2020).

Pajak memiliki peranan penting terhadap pendapatan negara di masa kini karena pajak merupakan sumber dana yang bersifat pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara (Dewi et al. 2024). Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mendanai keuangan negara dalam mengatasi masalah sosial, serta dapat pemeratakan pembangunan di setiap daerahnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pemerintah ingin melepaskan ketergantungannya pada bantuan yang

diperoleh dari pihak luar negeri dan beralih pada kemampuan negara sendiri dengan melalui peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan pada negara, begitu juga pada pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan suatu wewenang atau tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahnya (Wibawa et al. 2022). Penyelenggaraan otonomi daerah adalah peranserta masyarakat melalui sektor pajak dan retribusi pada daerah, yang dimana penerimaan pajak daerah seharusnya dapat membiayai kebutuhan daerahnya sendiri (Dewi et al. 2020).

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut, dan dikendalikan oleh pemerintah daerah, pajak daerah terbagi lagi berdasarkan lembaga pemungutan yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota, yang setiap daerahnya memiliki hak serta kewajiban untuk mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. (Rasul Hamidi et al. 2023). Adapun jenis Pajak Daerah yang dipungut, dan dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi yaitu terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan lain - lain, sedangkan pajak yang dipungut, dan dikendalikan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota yaitu terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain - lain.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Pajak Daerah Provinsi Bali. Adapun pajak yang dipungut, dan dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali yaitu salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB). Pajak Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor, sedangkan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik dari kendaraan bermotor yang terjadi akibat sebuah perjanjian antara satu pihak atau lebih, dan keadaan yang terjadi akibat transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, dan warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan penerimaan pajak daerah yang berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan PAD Provinsi Bali (Pratiwi et al. 2022). Berikut merupakan data realisasi penerimaan Pajak Daerah Provinsi Bali pada tahun 2019 – 2023 yang menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan pajak yang memberikan kontribusi kepada penerimaan pajak daerah yang sangat besar dibandingkan pajak lain yang diterima oleh daerah Provinsi Bali.

Tabel 1. 1
Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 -2021

No	Jenis Pajak Daerah	2019	2020	2021
1.	PKB	1.560.964.729.126	1.406.305.266.650	1.415.682.687.835
2.	BBNKB	1.256.433.265.300	588.312.794.900	455.470.487.500
3.	PBBKB	398.841.411.716	302.107.523.233	297.064.139.570
4.	Pajak AP	3.669.053.842	3.164.083.746	2.960.221.364
5.	Pajak Rokok	244.087.933.600	308.100.728.174	287.353.322.431

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Tabel 1. 2

Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Bali Tahun 2022-2023

No	Jenis Pajak Daerah	2022	2023
1.	PKB	1.691.067.147.050	1.740.695.696.000
2.	BBNKB	790.440.045.700	1.413.575.676.600
3.	PBBKB	411.061.253.416	564.730.129.155
4.	Pajak AP	3.384.913.300	4.094.857.640
5.	Pajak Rokok	334.886.047.725	325.474.672.374

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Berdasarkan Tabel 1.1 dan 1.2 mengenai Data Realisasi Pajak Daerah Provinsi Bali Pada Tahun 2019 – 2023 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Provinsi Bali yang paling besar yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dibandingkan dengan 3 (tiga) jenis penerimaan pajak lainnya pada daerah Provinsi Bali. Dari hal tersebut penerimaan PKB dan pajak BBNKB harus optimal agar penerimaan pajak daerah pada Provinsi Bali tidak terjadinya penurunan. Untuk mengoptimalkan penerimaan PKB maka diperlukannya pemungutan pajak terhadap kendaraan bermotor.

Dalam hal perpajakan, tindakan yang sering dilakukan wajib pajak yaitu penghindaran pajak, terutama pada pajak kendaraan bermotor yang dimana Bapak I Made Santha selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi (BAPENDA) mengaku masih banyaknya masyarakat di Provinsi Bali yang belum melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor (Purnamawati et al. 2023). Berikut ini merupakan data jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2019 – 2023 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Tabel 1. 3
Data Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2023
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

No	Nama UPTD	Tunggakan (Unit)				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	UPT SAMSAT DENPASAR	176,682	158,360	137,033	97,292	64,607
2.	UPT SAMSAT BADUNG	114,290	108,336	101,316	68,592	47,195
3.	UPT SAMSAT KELUNGKUNG	16,736	14,569	18,259	13,150	8,103
4.	UPT SAMSAT GIANYAR	51,584	49,530	61,922	41,370	27,002
5.	UPT SAMSAT TABANAN	44,812	40,722	44,506	34,431	20,410
6.	UPT SAMSAT BANGLI	14,022	11,910	16,106	14,140	7,907
7.	UPT SAMSAT KARANGASEM	22,054	22,124	30,485	24,170	15,449
8.	UPT SAMSAT JEMBRANA	24,538	19,561	26,345	21,472	10,375
9.	UPT SAMSAT BULELENG	57,673	46,021	54,388	44,220	28,641
TOTAL		522,391	471,133	490,360	358,837	229,689

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Berdasarkan tabel 1.3 mengenai Data Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019 – 2023 mengalami penurunan, tetapi dalam penurunan tersebut masih banyak kendaraan yang menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang dimana pada tahun 2019 yaitu sebesar 522,391 unit kendaraan, pada tahun 2020 yaitu sebesar 471,133 unit kendaraan, pada tahun 2021 yaitu sebesar 490,360, pada tahun 2022 yaitu sebesar 358,837 unit kendaraan dan pada tahun 2023 masih terdapat 229,689 unit kendaraan yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Dari hal tersebut masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor maka akan dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran yang dapat membebani masyarakat, yang dimana masyarakat harus membayar pokok pajak kendaraan bermotor beserta denda dan bunganya. Maka dari tunggakan tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan APBD Provinsi Bali. Pada wawancara penulis dengan Bapak I Made Santha, selaku Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, yang dimana beliau menyatakan:

“Jika angka tunggakan pajak tersebut dapat mempengaruhi target APBD maka pemerintah akan mengeluarkan sebuah kebijakan relaksasi pajak dalam bentuk kebijakan pemutihan dan kebijakan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor.”

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah kebijakan yang di buat pemerintah yang dimana pemerintah memberikan insentif yaitu penghapusan atau pengurangan denda atas keterlambatannya masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Sedangkan kebijakan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor adalah kebijakan yang diberikan pemerintah dengan memberikan sebuah insentif berupa pembebasan terhadap pokok bea balik nama kendaraan bermotor yang diberikan kepada masyarakat yang ingin melakukan bea balik nama yang berada pada dalam atau luar Provinsi.

Dengan diadakannya Kebijakan Pemutihan dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tahun 2019 - 2023. Dimana kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali dalam meringankan beban

masyarakat yang selama ini belum dapat untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak kendaraan bermotor maupun yang ingin melaksanakan balik nama kendaraan bermotor. Dimana dalam rentangan waktu yang ditentukan masyarakat terutama pada Provinsi Bali dapat memanfaatkan program tersebut yang meliputi penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Dari kebijakan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan realisasi penerima PKB.

Berikut ini merupakan data dari target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Tabel 1. 4
Data Target dan Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB Tahun 2019 - 2023 Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Tahun	Target		Realisasi	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
2019	1.420.000.000.000	1.160.200.000.000	1.560.964.729.126	1.257.915.929.600
2020	1.189.316.392.500	1.126.994.640.308	1.406.305.266.650	588.312.794.900
2021	1.250.000.000.000	737.960.152.487	1.415.682.687.835	455.470.487.500
2022	1.476.456.248.000	674.136.937.290	1.691.067.147.050	790.440.045.700
2023	1.495.870.827.460	985.019.675.880	1.740.695.6996.000	1.413.575.676.600

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PKB selama 5 Tahun mengalami kenaikan sedangkan penerimaan BBNKB juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 – 2020 persentase realisasi pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar 8% sedangkan untuk BBNKB mengalami penurunan sebesar 56,09 % yang artinya realisasi pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan dan mencapai target, sedangkan

pada bea balik nama kendaraan bermotor mengalami penurunan dan tidak mencapai target. Pada tahun 2020 – 2021 persentase realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan sebesar 5%, sedangkan untuk BBNKB mengalami kenaikan sebesar 9,52 % yang artinya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan tetapi tetap mencapai target, sedangkan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor mengalami penurunan dan tidak mencapai target.

Pada tahun 2021 – 2022 persentase realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar 2%, sedangkan untuk BBNKB mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 55,53% yang artinya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan dan mencapai target, sedangkan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor mengalami kenaikan dan mencapai target. Pada Tahun 2022-2023 persentase realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar 1%, sedangkan untuk BBNKB mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 26,25 % yang artinya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan dan mencapai target, sedangkan bea balik nama kendaraan bermotor mengalami kenaikan dan mencapai target.

Kontribusi kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor cukup besar, yang dimana dari hasil observasi penulis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, penulis memperoleh data berupa jumlah kontribusi kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik

nama kendaraan bermotor pada penerimaan pajak kendaraan bermotor saat dilaksanakannya dari tahun 2019 – 2023 pada Provinsi Bali.

Pada tahun 2019 kendaraan yang mengikuti kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu berjumlah 341.074 Unit yang memberikan kontribusi pada realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar 11,88% dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor sejumlah Rp. 185.499.939.925, Pada tahun 2020 kendaraan yang mengikuti kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu berjumlah 564,215 Unit yang memberikan kontribusi pada realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar 24,78% dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor sejumlah Rp. 348.536.867.525, Pada tahun 2021 kendaraan yang mengikuti kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu berjumlah 484,876 Unit yang memberikan kontribusi pada realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar 29,60% dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor sejumlah Rp. 419.075.816.385.

Pada tahun 2022 kendaraan yang mengikuti kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu berjumlah 736.111 Unit yang memberikan kontribusi pada realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar 44,41% dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor sejumlah Rp. 750.985.173.350, dan pada tahun 2023 kendaraan yang mengikuti kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu berjumlah 430.521 Unit yang memberikan kontribusi pada realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar 25,59% dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor sejumlah Rp. 750.985.173.350. Dari data tersebut dapat dilihat

bahwa masyarakat sangat antusias mengikuti kebijakan tersebut yang dapat memudahkan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan yang akan melakukan bea balik nama kendaraan bermotor.

Sehubungan dengan diadakannya kebijakan Pemutihan dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tahun 2019 – 2023 tetapi masih terdapat banyak masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan dilihat juga pada data pendapatan pajak kendaraan bermotor yang diperoleh dari dilaksanakannya kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2019 - 2023 yang cukup berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti seberapa tingkat efektivitas kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019 – 2023 dengan menggunakan analisis efektivitas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitria Handayani, Berto Usman (2023) yang dimana diperoleh hasil berupa penerimaan pajak kendaraan roda dua dari kebijakan pemutihan tidak efektif, tetapi kontribusinya tercatat dalam kategori baik pada peningkatan PAD pada akhir tahun 2021 di Kota Bengkulu. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh Yessica Amelia (2021) yang dimana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan sangat efektif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2015 – 2020, dan dengan

adanya kebijakan pemutihan dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria Handayani, Berto Usman (2023), dan Yessica Amelia (2021) adalah terletak pada objek penelitian yang dimana pada penelitian ini berfokus kepada dua objek yaitu kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang di analisis menggunakan analisis efektivitas. Selain itu, perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada waktu, lokasi, dan data yang digunakan pada penelitian ini, yang dimana pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, lokasi penelitian ini pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali selangku penanggung jawab terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Bali dan juga penanggung jawab atas penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan penanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada Provinsi Bali, dan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang terbaru.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Kebijakan Pemutihan Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari diadakanya kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor setiap tahunnya masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019 – 2023, dilihat juga dari kenaikan realisasi

penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 – 2023 pada saat terlaksananya kebijakan pemutihan, dan kontribusi kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka dari hal tersebut penulis ingin menganalisis seberapa efektifitaskah kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada penerimaan pajak kendaraan bermotor. Apakah dengan diadakannya kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dapat mengurangi jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan tersebut penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu berfokus kepada analisis tingkat efektivitas kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 -2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat efektivitas kebijakan pemutihan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019 – 2023 ?

2. Bagaimana Tingkat efektivitas kebijakan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019 – 2023 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan pemutihan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019 - 2023.
2. Untuk mengetahui Tingkat efektivitas kebijakan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019 - 2023.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya pembuatan tugas akhir ini, penulis mengharapkan tugas akhir ini dapat berguna bagi beberapa aspek yaitu :

1. Aspek Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk para peneliti selanjutnya sebagai sebuah contoh dan referensi dalam menganalisis Tingkat efektivitas kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Aspek Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini pada aspek praktis yaitu dapat berguna bagi :

a. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dalam memahami mekanisme pengukuran tingkat efektivitas kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada penerimaan pajak kendaraan bermotor

b. Bagi Universitas

Bagi Universitas diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan bacaan bagi Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik pada Perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha, dan Fakultas Ekonomi.

c. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai saran bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali, terutama pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam mencapai penerimaan pajak kendaraan bermotor yang sesuai dengan target dan dapat membuat kebijakan – kebijakan atau program – program yang dapat memudahkan masyarakat dan dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor secara efektif.